



bacaini.id

ANALISIS KOMPREHENSIF MODEL DEMOKRASI PEMILIHAN PEMIMPIN DAERAH

Wacana Perubahan Pilkada:

Langsung vs Tidak Langsung

2025



LITBANG BACAINI.ID

Research & Development Division



CAKUPAN ANALISIS KOMPREHENSIF



6

MODEL DEMOKRASI

Analisis perbandingan sistem pemilihan pemimpin daerah di berbagai negara di dunia.



580

KURSI DPR RI

Pemetaan pola dukungan partai politik di parlemen terhadap wacana perubahan sistem.



2.69M

RESPONS PUBLIK

Analisis big data dari percakapan media sosial dan sentimen publik.

Analisis mencakup perbandingan internasional, sejarah, dan dinamika politik.

Sumber: Litbang Bacaini.ID

DUNIA MENGENAL 4 MODEL UTAMA PEMILIHAN KEPALA DAERAH



PEMILIHAN LANGSUNG

Rakyat memilih langsung kepala daerah melalui pemungutan suara. Memberikan legitimasi politik tertinggi.

CONTOH: AS, Brasil, India, Indonesia, Korea Selatan

PEMILIHAN OLEH LEGISLATIF

Kepala daerah dipilih oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/Parlemen).

CONTOH: Belanda, Malaysia, Singapura

COUNCIL-MANAGER

Dewan kota yang terpilih menunjuk seorang manajer profesional sebagai eksekutif daerah.

CONTOH: AS (beberapa kota), Eropa

PENGANGKATAN PUSAT

Kepala daerah diangkat dan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa proses pemilihan lokal.

CONTOH: Timur Tengah, Rezim Otoriter

PERBANDINGAN: LANGSUNG VS DPRD

✔ PEMILIHAN LANGSUNG

Legitimasi Kuat

Mandat langsung dari rakyat, akuntabilitas vertikal yang jelas.

Partisipasi Publik

Meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan warga negara.

Kelemahan: Biaya Tinggi

Membutuhkan anggaran besar untuk penyelenggaraan dan kampanye.

🗳️ PEMILIHAN OLEH DPRD

Efisiensi Anggaran

Biaya penyelenggaraan jauh lebih murah dan proses lebih cepat.

Stabilitas Politik

Mengurangi potensi konflik horizontal di masyarakat.

Kelemahan: Politik Uang

Rawan transaksi politik elitis (money politics) di tingkat dewan.

EVOLUSI SISTEM PEMILIHAN

1945-59

1965-98

1999-04

2005-Kini



DPRD MEMILIH

Kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagai representasi kedaulatan rakyat di daerah.



SENTRALISTIK

Era Orde Baru, penunjukan terpusat oleh pemerintah pusat (Kemendagri).



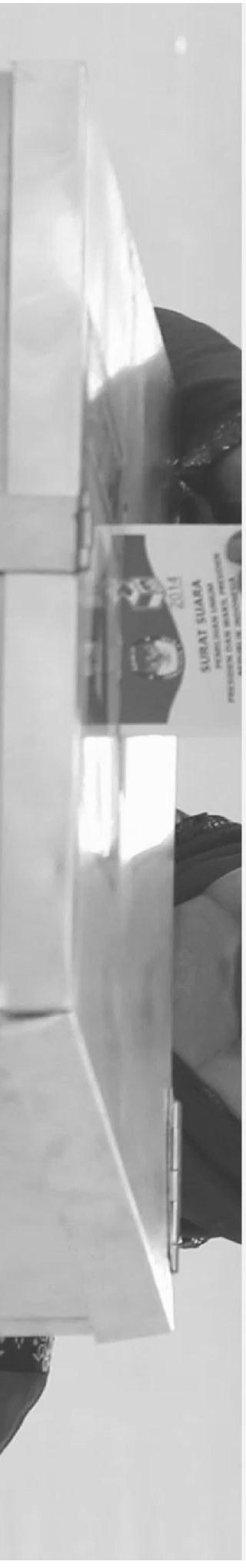
TRANSISI

Kembali dipilih oleh DPRD pasca reformasi, namun diwarnai politik uang.



LANGSUNG

Pilkada langsung oleh rakyat dimulai, memberikan mandat penuh.



SEMANGAT REFORMASI 1998

“Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat adalah **amanat reformasi** yang tidak boleh dikhianati.”

— **Filosofi Demokrasi Langsung**

KONTEKS HISTORIS

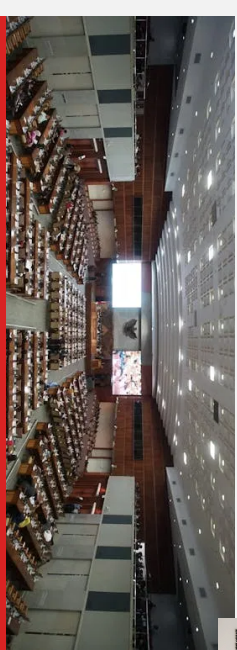
Pilkada langsung lahir sebagai koreksi atas praktik sentralistik Orde Baru dan politik transaksional di DPRD pada masa transisi.

WACANA KEMBALI KE PEMILIHAN OLEH DPRD

ISU UTAMA

Usulan revisi UU Pilkada untuk mengembalikan mekanisme pemilihan ke tangan DPRD.

- ▶ Didorong oleh evaluasi terhadap tingginya biaya politik (high cost politics).
- ▶ Kekhawatiran akan polarisasi sosial yang tajam akibat pilkada langsung.
- ▶ Argumen keselarasan dengan Sila ke-4 Pancasila (Permusyawaratan/Perwakilan).



Rp 100T+

ESTIMASI PENGHEMATAN

Potensi penghematan anggaran negara dan biaya politik kandidat jika sistem diubah menjadi pemilihan oleh DPRD.

ARGUMEN KUNCI: EFISIENSI VS HAK RAKYAT

🗳️ MENDUKUNG PEMILIHAN DPRD

"Solusi atas mahalnnya biaya demokrasi dan korupsi kepala daerah."

- Menghemat triliunan rupiah anggaran negara (APBN/APBD).
- Meminimalisir konflik horizontal antar penduduk.
- Fokus kepala daerah pada kinerja, bukan pencitraan kampanye.

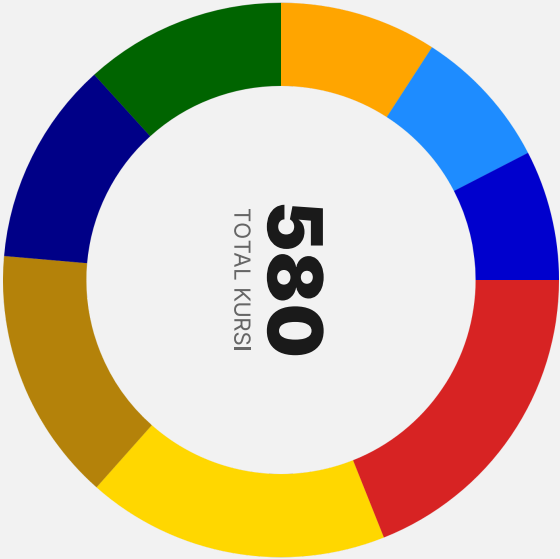
🗳️ MENOLAK PEMILIHAN DPRD

"Kemunduran demokrasi dan perampasan hak konstitusional rakyat."

- Potensi oligarki partai semakin kuat di daerah.
- Rakyat kehilangan hak untuk menentukan pemimpinnya sendiri.
- Rawan 'transaksi di ruang gelap' antar elit partai.

PETA POLITIK DPR RI (580 KURSI)

KOMPOSISI PARTAI



PDIP	110 (19%)	Golkar	102 (18%)
Gerindra	86 (15%)	PKB	68 (12%)
NasDem	69 (12%)	PKS	53 (9%)
Demokrat	44 (8%)	PAN	48 (8%)

Analisis Koalisi: Mayoritas partai pendukung pemerintah (KIM Plus) menguasai lebih dari 70% kursi, memuluskan jalan bagi revisi UU Pilkada jika disepakati di tingkat elit.



BIG DATA: SUARA PUBLIK DI MEDIA SOSIAL

Periode Analisis: 1 Januari 2024 - 1 Januari 2025



2.69M

TOTAL VIEWS

Jumlah tayangan konten terkait isu Pilkada di berbagai platform.



13.8K

MENTIONS

Total sebutan kata kunci spesifik dalam percakapan publik.



105K

ENGAGEMENT

Interaksi (like, share, comment) yang menunjukkan tingkat atensi.

"Tingginya volume percakapan menunjukkan bahwa isu mekanisme Pilkada sangat sensitif dan menjadi perhatian utama publik digital."

TIKTOK & INSTAGRAM DOMINAN POSITIF, TWITTER & REDDIT KRITIS

● SENTIMEN POSITIF ● SENTIMEN NEGATIF ● NETRAL

PRABOWO SUBIANTO MENDOMINASI PERBINCANGAN

ANALISIS FREKUENSI SEBUTAN (MENTIONS) DI MEDIA SOSIAL

TOP 5 TOKOH POLITIK

01	Prabowo Subianto	2.808
02	Gibran Rakabuming	936
03	Joko Widodo	921
04	Anies Baswedan	608
05	Ridwan Kamil	445

TOP 5 INFLUENCER / PEJABAT

01	Prabowo Subianto	3.849
02	Tito Karnavian	2.297
03	Bima Arya	936
04	Sufmi Dasco Ahmad	907
05	Titi Anggraini	832

TIGA UU DAN PASAL KONSTITUSI MENJADI TANTANGAN HUKUM

➦ UU YANG HARUS DIREVISI

UU No. 10 Tahun 2016

TENTANG PILKADA

Mengatur mekanisme pilkada langsung. Harus direvisi total untuk mengubah sistem pemilihan.

UU No. 7 Tahun 2017

TENTANG PEMILIHAN UMUM

Mengatur hubungan pemilu legislatif dan pilkada. Perlu penyesuaian rezim pemilu.

UU No. 23 Tahun 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Mengatur kewenangan kepala daerah dan mekanisme pemilihannya.

Syarat Konstitusional

PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945

"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah... dipilih secara demokratis."

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MK menafsirkan frasa "demokratis" sebagai pemilihan langsung oleh rakyat dengan asas Luber Jurdil (Putusan No. 55/PUU-XVII/2019).

POLARISASI OPINI: ELITE VS PUBLIK

ELITE POLITIK

MENDUKUNG

Koalisi pemerintah solid mendukung perubahan sistem demi efisiensi anggaran.

- Dukungan mayoritas di DPR
- Didorong oleh pimpinan partai
- Argumen penghematan biaya

GRASSROOTS & PAKAR

TERPOLARISASI

Resistensi kuat dari kalangan aktivis dan akademisi, namun publik umum terbelah.

- Aktivis & Pakar: Menolak keras
- Medsos Visual: Cenderung Positif
- Medsos Diskursif: Sangat Kritis

KESIMPULAN & PREDIKSI

Secara matematis usulan berpeluang besar disahkan, namun Tekanan Publik dan Uji Konstitusionalitas di MK akan menjadi penentu akhir.

**Catatan: Macana ini masih dalam tahap diskusi dan belum menjadi kebijakan resmi.*

TERIMA KASIH

PRESENTER

Litbang Bacaini.ID

SUMBER DATA

Riset Media Sosial, Media Online, dan Analisis Politik 2024-
2025

KUNJUNGI KAMI

 **bacaini.id**

Data dan Analisis Komprehensif © 2025

